



PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II TAHUN **2024**

PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TRIWULAN II TAHUN 2024
(Periode Survei bulan April - Juni)

berdasarkan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023



PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
2024

LEMBAR PENGESAHAN**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

Disahkan di Surabaya
pada hari Senin, 08 Juli 2024



Top Management,

Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Sekretaris Tim Survei,

Benny Hardiyanto, S.H.

Ketua Tim Survei,

H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama pada Triwulan II Tahun 2024 (periode survei bulan April – Juni) dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 sekaligus menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 4 April 2023 Nomor 1098/DjA.1/HM.00/4/2023 perihal Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi.

Survei ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas dari korupsi. Kepuasan penerima layanan dalam hal tingkat persepsi korupsi dapat dijelaskan/ diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/ diharapkan.

Pelaksanaan dan laporan survei ini masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan prima terhadap pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Demikian laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Surabaya, 08 Juli 2024

Ketua Tim Survei,



H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan tekad untuk menciptakan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Surabaya berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Guna mengukur tingkat persepsi korupsi dalam pelayanan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II Tahun 2024 (Periode Survei bulan April – Juni). Pelaksanaan survei ini merupakan wujud kepatuhan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Survei ini bertujuan untuk memetakan persepsi pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait dengan usaha pencegahan dan penanganan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Laporan survei ini memuat hasil evaluasi pelayanan publik dan persepsi korupsi mengenai pelayanan publik dan persepsi korupsi dalam pelayanan yang diberikan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap 180 responden yang dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi Sistem Informasi Servei Terintegrasi (Si Surti) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) meliputi 5 (lima) indikator, antara lain:

- a. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,94;
- b. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,96;
- c. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,96;
- d. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,97;
- e. Tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,96.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis dalam persepsi korupsi Triwulan II Tahun 2024, didapati nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,96 atau nilai interval konversi sebesar 98,95 yang tergolong dalam kategori mutu pelayanan A (bersih dari korupsi). Melalui hasil survei ini, diharapkan agar menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di masa mendatang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I KUESIONER SURVEI	1
BAB II METODOLOGI SURVEI	5
A. Kriteria Responden.....	5
B. Metode Pencacahan.....	5
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	7
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	9
A. Analisis Hasil Survei	9
B. Tindak Lanjut Hasil Survei	18
BAB IV DATA SURVEI	19
A. Data Responden	19
B. Data dukung Lainnya.....	37
BAB V PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Rekomendasi	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Morgan dan Krecjie	6
Tabel 2 Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi.....	8
Tabel 3 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	9
Tabel 4 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan	10
Tabel 5 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur.....	11
Tabel 6 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku.....	13
Tabel 7 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar.....	14
Tabel 8 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara.....	16
Tabel 9 Kesimpulan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan I Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10 Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	Error! Bookmark not defined.
Tabel 11 Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).....	20
Tabel 12 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan.....	32
Tabel 13 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 14 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
Tabel 15 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan ..	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	9
Grafik 2 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan.....	10
Grafik 3 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur.....	12
Grafik 4 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku.....	13
Grafik 5 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar	15
Grafik 6 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara	16
Grafik 7 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan.....	32
Grafik 8 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Grafik 9 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
Grafik 10 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan..	36

BAB I KUESIONER SURVEI

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Salah satu bentuk komitmennya berupa pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tahun 2024 (Periode Survei bulan Januari – Maret) yang menghasilkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menitikberatkan pada 2 (dua) sasaran, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selalu berupaya untuk selalu memberikan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan berupaya untuk dapat menjadi contoh bagi satuan kerja lain. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menyelenggarakan kegiatan dan layanan sesuai dengan prosedur dan standar yang ada, serta telah terbebas dari praktik korupsi, yang diantaranya dapat dilihat dari potensi pelaksanaan suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pencari keadilan, menilai tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya, serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

B. Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah peraturan perundangan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019; dan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan dan layanan yang telah diselenggarakan sekaligus sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Adapun Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya korupsi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
4. Menilai efektifnya program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi;
5. Membantu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengevaluasi dan menyusun strategi dan program aksi lanjutan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas

institusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

D. Sasaran

Adapun sasaran dari penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini, antara lain:

1. Terselenggaranya pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bersih, akuntabel, dan transparan;
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai yang diharapkan oleh pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta anti gratifikasi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

F. Manfaat

Dengan tersedianya data dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara periodik, maka dapat diperoleh manfaat:

1. Mengetahui kelemahan/ kekurangan dari masing-masing unsur/ indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan; dan
4. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

G. Unsur/ Indikator Penilaian

Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yang memuat 5 (lima) unsur/ indikator, antara lain mencakup aspek integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan.

H. Kuesioner Survei

Kuesioner survei yang disusun untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, sebagai berikut:

1. Bagian I: Identitas Responden, meliputi
 - a. Nama responden;
 - b. Nomor ponsel responden;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Usia;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Pendidikan; dan
 - g. Jenis layanan
2. Bagian II: Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Pelaksanaan survei ini menggunakan kuesioner sebagai alat bantu untuk pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan. Kuesioner *online* melalui *link* <https://survei.badilag.net/> terdiri dari 5 (lima) unsur pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan peradilan. Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan (nilai 1 – 6) yang dapat dijabarkan, sebagai berikut:

- a. Diberi nilai 1 (tidak sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, tahapan terlalu banyak sehingga prosesnya tidak efektif;
- b. Diberi nilai 2 (tidak jelas), jika pelaksanaan prosedur pelayanan tidak ada, alurnya tidak mudah, tahapan terlalu banyak sehingga prosesnya tidak efektif;
- c. Diberi nilai 3 (kurang jelas), jika pelaksanaan prosedur pelayanan ada namun belum jelas arah alurnya sehingga prosesnya tidak efektif;
- d. Diberi nilai 4 (kurang efektif), jika pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum memuaskan sehingga prosesnya belum efektif;
- e. Diberi nilai 5 (sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit namun masih perlu diefektifkan; dan
- f. Diberi nilai 6 (sangat sesuai), jika pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat memuaskan, sangat sederhana sehingga prosesnya mudah dan efektif.

BAB II METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Responden adalah penerima pelayanan publik yang telah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggaraan pelayanan. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap responden yang datang ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maupun website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun yang menjadi kriteria survei, yaitu satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan masyarakat/ *stakeholder* yang mendapatkan manfaat pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan jenis layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, antara lain:

1. Layanan pembinaan dan pengawasan;
2. Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan;
3. Layanan penyelesaian perkara; dan
4. Layanan penyerahan produk pengadilan.

Kriteria responden yang diambil mencakup variasi yang cukup dari karakteristik masyarakat, seperti jenis layanan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan guna memastikan bahwa hasil survei dapat mewakili seluruh pengguna dengan baik.

B. Metode Pencacahan

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 1 (satu) variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Variabel pada pengukuran ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yang meliputi aspek diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan, permintaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan/ perantara.

Deskripsi kuantitatif sendiri bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Survei ini menggunakan tabel Morgen dan Krejcie sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat:

Tabel 1 Tabel Morgen dan Krejcie

Tabel Morgen & Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357

Sementara teknik yang digunakan dalam pemilihan responden survei ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian atau survei yang dilakukan. Dalam hal ini, responden yang dipilih adalah pengguna layanan yang telah menggunakan layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir. Dengan demikian, diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan survei yang dilakukan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

1. Pengolahan Data

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dihitung melalui aplikasi e-Survei SIMTALAK yang dapat diakses melalui alamat *link* <https://survei.badilag.net/> dengan menggunakan “nilai rata-rata” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap 5 (lima) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama sebagaimana rumus berikut:

$$\text{SPAK} = \frac{\text{Total jumlah bintang}}{\text{Jumlah responden} \times 30} \times 4$$

Untuk nilai persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Persentase SPAK} = \frac{\text{Total jumlah bintang}}{4} \times 100\%$$

2. Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala Likert dengan penilaian antara 1 – 6, di mana nilai 1 merupakan skor persepsi terendah (tidak sesuai), sementara nilai 6 merupakan skor persepsi tertinggi (sangat sesuai) dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani (semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan).

Metode analisis yang digunakan dalam survei ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu jenis analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan meringkas sekumpulan data sehingga lebih mudah dipahami. Alat kerja deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan nilai indeks persepsi kualitas pelayanan menggunakan statistik sederhana, yaitu dengan merata-ratakan skor yang diberikan responden atas pertanyaan survei.

Adapun nilai interval persepsi kualitas pelayanan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPAK	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Bersih dari Korupsi

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

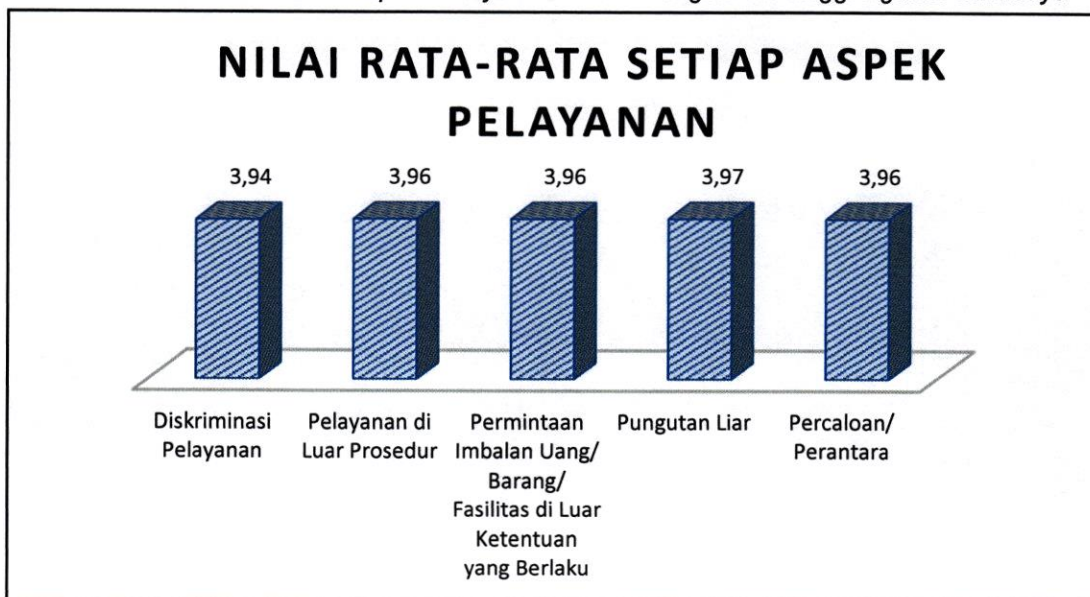
Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 180 responden. Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai rata-rata tertimbang Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,96 dengan nilai konversi sebesar 98,95 dan berada pada kategori **"SANGAT BAIK"**. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) diolah secara deskriptif untuk membantu menggambarkan kualitas dengan menghubungkan angka-angka dan variabel penilaian. Adapun nilai rata-rata setiap aspek pelayanan dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

	Unsur Pertanyaan	Nilai	Kategori	Peringkat
U1	Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3,94	Bersih dari Korupsi (A)	5
U2	Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3,96	Bersih dari Korupsi (A)	2
U3	Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3,96	Bersih dari Korupsi (A)	3
U4	Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3,97	Bersih dari Korupsi (A)	1
U5	Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini	3,96	Bersih dari Korupsi (A)	4
Rata-rata Tertimbang		3,96	Sangat Baik (A)	-

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 1 Nilai Rata-Rata Aspek Pelayanan SPAK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 (lima) unsur pelayanan, terdapat unsur pelayanan yang memiliki kualitas pelayanan sangat baik, yaitu pungutan liar. Sedangkan unsur pelayanan yang memiliki kualitas pelayanan paling rendah, yaitu diskriminasi pelayanan. Di bawah ini merupakan analisis data hasil masing-masing aspek pelayanan dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,94. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

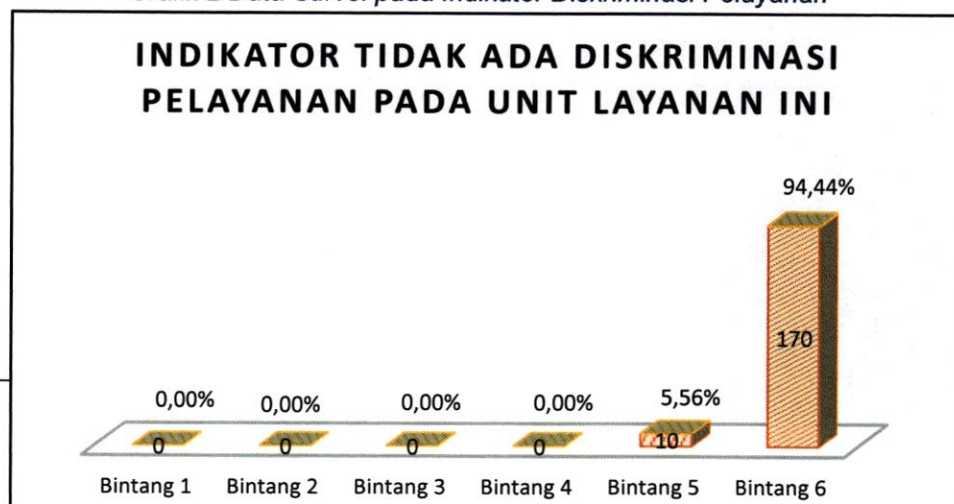
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	10	5,56%
★ ★ ★ ★ ★ ★	170	94,44%
Jumlah	180	100,00%
Indeks		3,94

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2 Data Survei pada Indikator Diskriminasi Pelayanan



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,94. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 170 responden (94,44%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebagai pengguna layanan menganggap bahwa petugas layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memberikan layanan tidak membedakan berdasarkan faktor identitas tertentu yang bersifat subjektif. Selain itu, sejumlah 10 responden (5,56%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek kesamaan perlakuan terhadap pengguna layanan masih perlu ditingkatkan agar lebih memenuhi kebutuhan pengguna layanan.

2. Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/ prosedur, pengurangan denda, dll. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan menunjukkan hasil pada indeks 3,96. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

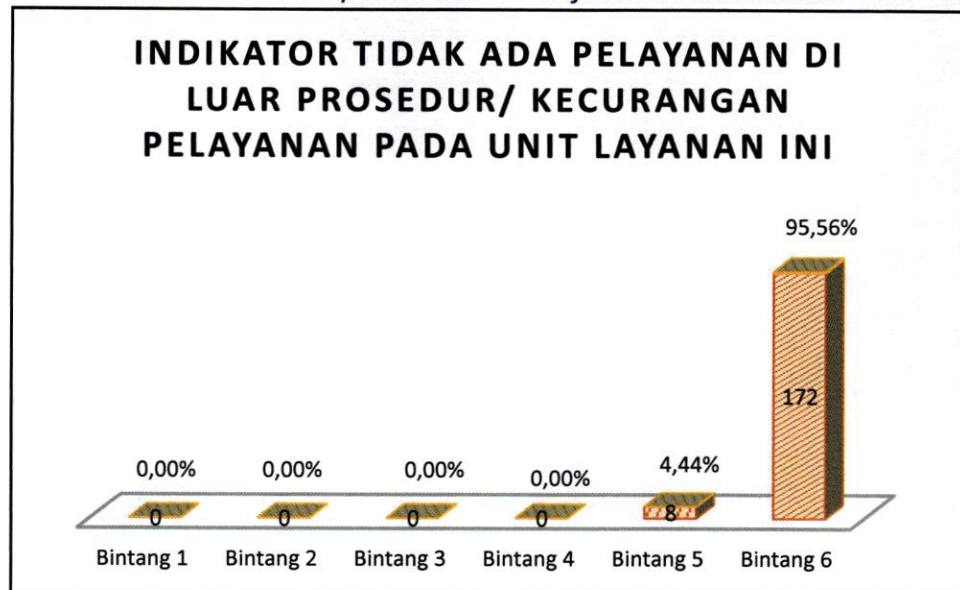
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	8	4,44%
	172	95,56%
Jumlah	180	100,00%
Indeks		3,96

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3 Data Survei pada Indikator Pelayanan di Luar Prosedur



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,96. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 172 responden (95,56%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, sejumlah 8 responden (4,44%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek tidak adanya kecurangan pelayanan masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

- Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/ bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/ jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) di luar ketentuan. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,96. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

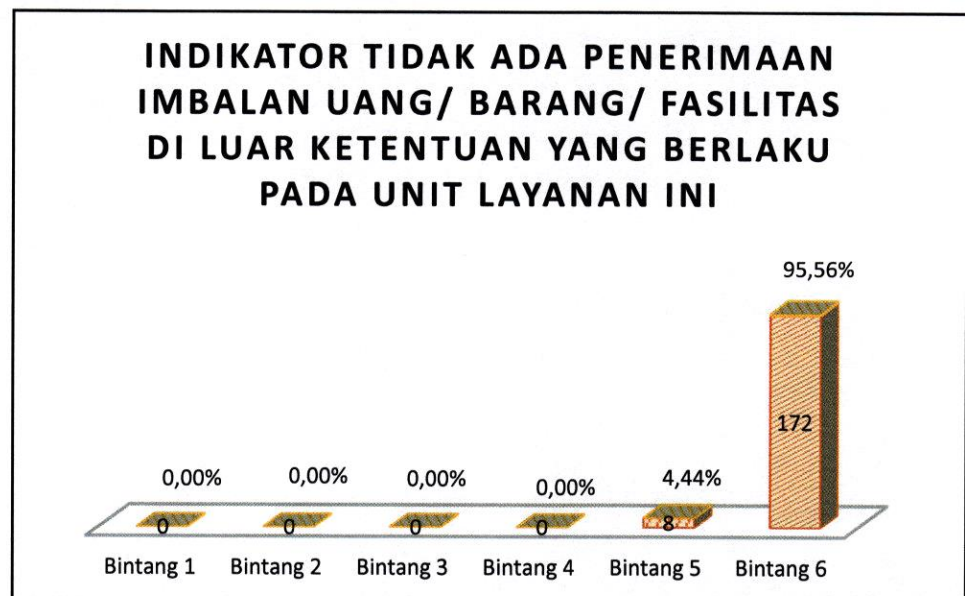
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	8	4,44%
★ ★ ★ ★ ★ ★	172	95,56%
Jumlah	180	100,00%
Indeks		3,96

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 4 Data Survei pada Indikator Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini berada pada angka 3,96. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 172 responden (95,56%) memberikan skor bintang 6 pada tidak ada penerimaan imbalan uang/

barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sementara itu, sejumlah 8 responden (4,44%) memberikan skor bintang 5 yang berarti bahwa aspek tidak ada imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan masih perlu ditingkat lagi.

4. Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli) bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

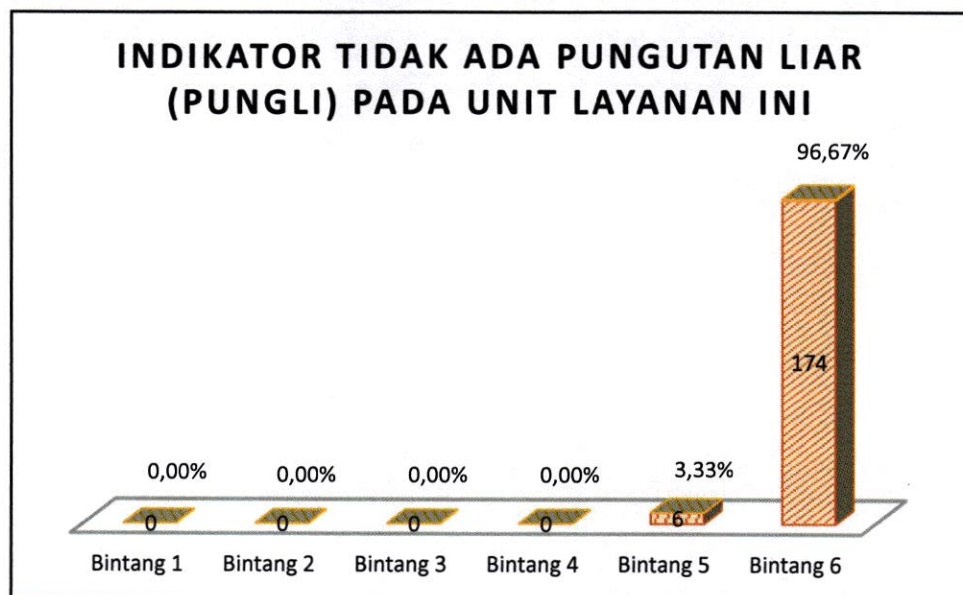
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator jangka waktu penyelesaian pelaksanaan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	0	0,00%
	6	3,33%
	174	96,67%
Jumlah	180	100,00%
Indeks		3,97

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 5 Data Survei pada Indikator Pungutan Liar



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,97. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 174 responden (96,67%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sementara itu, sejumlah 6 responden (3,33%) memberikan skor bintang 5 yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden belum sepenuhnya setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

5. Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Informasi ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan yang dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/ atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai. Dari skala 1 – 6, hasil persepsi responden pada indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,96. Hal ini menunjukkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

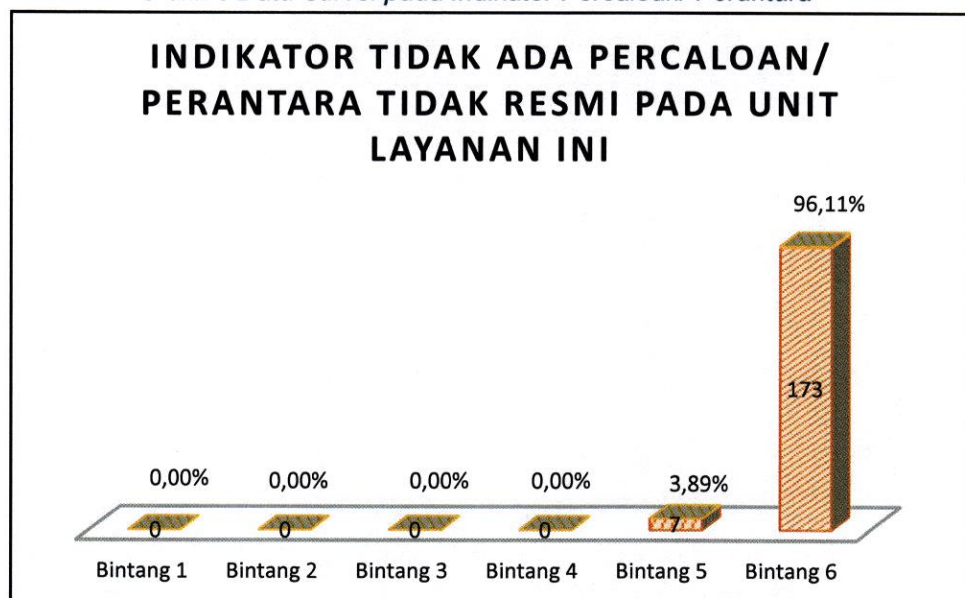
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan pengguna layanan pada indikator tarif/ biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan tarif/ biaya yang ditetapkan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara

Jumlah Bintang	Jumlah	Persentase
★	0	0,00%
★ ★	0	0,00%
★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★	0	0,00%
★ ★ ★ ★ ★	7	3,89%
★ ★ ★ ★ ★ ★	173	96,11%
Jumlah	180	100,00%
Indeks		3,96

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 6 Data Survei pada Indikator Percaloan/ Perantara



Tingkat persepsi anti korupsi pada indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini berada pada angka 3,96. Dari data survei di atas, dapat dilihat bahwa sejumlah 173 responden (96,11%) memberikan skor bintang 6 pada indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selain itu, sejumlah 7 responden (3,89%) memberikan skor bintang 5 yang dapat diartikan bahwa aspek tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada pelayanan masih tetap perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan II Tahun 2024 (periode survei bulan April – Juni) dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Tabel 9 Kesimpulan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No	Kesimpulan	Keterangan
1	Nilai SPAK	3,96 dengan nilai konversi 98,95
2	Kategori	Bersih dari Korupsi
3	Unsur Terendah	U1: Diskriminasi Pelayanan
4	Unsur Tertinggi	U4: Pungutan Liar
5	Prioritas Perbaikan	U1: Diskriminasi Pelayanan

Guna memotivasi dan memperbaiki kinerja pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka masukan/ opini/ pandangan masyarakat/ *stakeholder* sangat diperlukan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat/ *stakeholder*. Masukan dan pandangan pengguna layanan pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10 Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No.	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
1	Pelayanan prima untuk dipertahankan
2	Pertahankan pelayanan yang sudah bagus
3	Jaga dan tingkatkan kualitas pelayanan yang baik ini
4	Tetap dipertahankan pelayanan yang sudah <i>excellent</i>
5	Layanan dan pembinaan sudah cukup baik, mohon dipertahankan
6	Pertahankan pelayanan yang sudah sangat baik
7	Teruslah berinovasi dalam memberikan pelayanan
8	Semoga PTA Surabaya terus berinovasi untuk memberikan layanan prima
9	Semoga pelayanan kian bagus dan ditingkatkan
10	Pelayanan sudah sangat baik, semoga bisa terus konsisten dalam memberikan pelayanan yang prima

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Pelaksanaan hasil survei yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan II Tahun 2024 (periode survei bulan April – Juni) didapatkan hasil survei sebesar 98,95 dengan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 3,96 yang termasuk dalam kategori **“BERSIH DARI KORUPSI”**. Dari 5 (lima) unsur/ indikator, terdapat nilai unsur tertinggi, yaitu pada unsur pungutan liar dengan nilai 3,97 sementara unsur diskriminasi pelayanan memperoleh nilai unsur terendah, yaitu sebesar 3,94.

Meskipun sebagian besar responden memberikan skor dan rata-rata yang tinggi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), namun terdapat beberapa catatan analisis yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan layanan agar pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya semakin optimal dan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat terus meningkat.

Tindak lanjut tersebut juga diperlukan guna mewujudkan komitmen Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang salah satu arahnya adalah kondisi birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut merupakan tindak lanjut yang harus dilaksanakan berdasarkan pada analisis hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan bagi petugas PTSP sebagai pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan prima, cepat, efektif, dan akuntabel berdasarkan SOP; dan
2. Melakukan supervisi terhadap petugas PTSP agar pelayanan petugas PTSP sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Setelah melakukan tindak lanjut, pihak unit layanan harus memantau dan mengevaluasi kembali kinerja untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan efektif dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Secara keseluruhan, tindak lanjut hasil survei harus melibatkan tindakan konkret yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit layanan tersebut. Hal ini penting agar kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

BAB IV DATA SURVEI

A. Data Responden

Responden ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan II Tahun 2024 (periode survei bulan April – Juni) diikuti oleh 180 responden yang seluruhnya merupakan pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun data dari para responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Triwulan II Tahun 2024 (periode survei bulan April – Juni), sebagai berikut:

Gambar 1 Identitas Responden pada Aplikasi Si Surti Ditjen Badilag

The screenshot displays the 'Identitas Responden' (Respondent Identity) form within the 'Si Surti (SISTEM SURVEI TERINTEGRASI)' application. The interface features a blue header with the 'SURVEILAG' logo and navigation links for 'Dashboard' and 'Survei'. A progress bar at the top indicates the current step is 'Data Responden' (Respondent Data), with other steps being 'Layanan' (Service), 'Form Kuisioner' (Questionnaire Form), and 'Kritik & Saran' (Criticism & Suggestions).

The form itself is titled 'Identitas Responden' and includes a privacy assurance: 'Kami menjamin kerahasiaan data pribadi anda' (We guarantee the confidentiality of your personal data). The fields are organized as follows:

- Nama Responden** (Respondent Name): A text input field.
- NIK (Nomor Identitas)** (Identity Number): A text input field.
- Nomor Ponsel Responden** (Respondent Mobile Number): A text input field with a placeholder 'contoh : 08xxxx'.
- Email**: A text input field.
- Jenis Kelamin** (Gender): A dropdown menu with the option 'Pilih Jenis Kelamin'.
- Usia** (Age): A dropdown menu with the option 'Pilih usia'.
- Pekerjaan** (Occupation): A dropdown menu with the option 'Pilih pekerjaan'.
- Pendidikan** (Education): A dropdown menu with the option 'Pilih pendidikan'.

At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'Bahwa saya mengisi data ini dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun' (That I fill out this data truthfully and without coercion from anyone). Below the checkbox are two navigation buttons: '< Kembali' (Back) and 'Selanjutnya >' (Next).

Tabel 11 Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
1	Abdul Kodir, S.Ag., M.M.	08*****5331	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
2	Nur Sa'diyah Sukmawati	08*****3335	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pelajar/ Mahasiswa	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
3	Irman Fadly, S.Ag., M.H.	08*****3123	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
4	Samina Laela, S.E., S.H., M.H.	08*****7840	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
5	Ahmad Makhtum Santoso, S.H.I.	08*****7955	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Karyawan Swasta	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
6	Sigit Apriluberta, S.H.	08*****8378	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
7	Muzdalifah	08*****5185	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Karyawan Swasta	Layanan penyelesaian perkara
8	Moh. Imron, S.H., M.H.	08*****9009	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
9	Siddiq Nur Iman, S.H.	08*****0096	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
10	Drs. H. Imam Farok, M.HES.	08*****2818	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
11	Tyara Septiana Putri, S.Psi.	08*****0749	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
12	Heri Fahrudin, S.H.	08*****7737	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
13	Teguh Wiyanto	08*****7800	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan penyelesaian perkara
14	M. Sa'dan, S.Ag	08*****4589	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
15	Drs. H. Ishadi, M.H.	08*****1235	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
16	Rima Titianingtyas, A.Md.	*****6132	Akademi/ Diploma	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
17	Rachmad Firman Kristanto	08*****5355	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
18	Rehanun Aisyah Prasetyo	08*****9672	SMA	Perempuan	Belum/ Tidak Bekerja	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
19	Fanroyen Ali Hamka	08*****9164	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
20	Hadijah Hasanuddin	08*****7081	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
21	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	08*****5433	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
22	Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.	08*****9007	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
23	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	08*****3147	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
24	Junaidi Syampurno, S.H.	08*****2247	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
25	Buyung Tumanggor, S.Kom.	08*****9833	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
26	Khusnul Aini, S.H., M.H.	08*****5582	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
27	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom.	08*****6771	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
28	Mun Farida, S.H., M.H.	08*****0265	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
29	Silvi Ritmadhanti Ziyanna, S.E., S.H.	08*****0187	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
30	Lia Dyah Tarakanita, A.Md.	08*****7639	Akademi/ Diploma	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
31	Irawati Tirta Handayani, S.E.	08*****8022	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
32	Nandayu Anisa Ajitrisnani, S.T.	08*****1001	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
33	Ahmad Arifin Arfan, S.H.I., M.H.	08*****4009	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
34	Atik Yuliana, S.H.	08*****1501	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
35	Fenny Yunita Pratiwi, A.Md.	08*****5550	Akademi/ Diploma	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
36	Dewi Khusna, S.Ag., M.H.	08*****8274	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
37	Siti Artaniyah, S.Ag.	08*****0149	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
38	Amrulloh, S.H., M.H.	08*****2009	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
39	Nur Fitriah	08*****2345	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Karyawan Honorer	Layanan penyerahan produk pengadilan
40	Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.HES.	08*****5408	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
41	Nur Airin	08*****9907	SMA/ SMK Sederajat	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
42	Syaiful Arifin, S.H.	08*****4980	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
43	Tri Anita Budi Utama, S.H.	08*****9450	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
44	Amsaliya Khurun Ainun, S.H., M.H.	08*****3197	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
45	Mochamad Dedy Kurniawan, S.H., M.H.	08*****9980	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
46	Imamudin, S.Ag., M.H.	08*****7999	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
47	Abdul Kodir, S.Ag., M.M.	08*****5331	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pengacara	Layanan pembinaan dan pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
48	M. Sirojudin	08*****1529	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
49	H. Mashudi, S.Ag., M.H.	08*****8433	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
50	Hj. Siti Marfu'ah, S.H.	08*****6246	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
51	Durorin Humairo', S.H.	08*****1537	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
52	Rini Wulandari, S.H., M.H.	08*****9541	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
53	Dra. Farha Wakid	08*****0997	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
54	Eka Bkti Yani, S.Pd., S.H.	08*****4625	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
55	Wakid Ariyadi, S.Sos., S.H.	08*****0457	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
56	Antoni Windika, S.H.	08*****8775	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
57	Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H.	08*****0018	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
58	Sri Hartati Ekwan Rubiyanti, S.Ag.	08*****5040	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
59	Rahmad Pujiraharja, S.H.	08*****9169	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
60	Muflihuddin Mubarak, S.Ag.	08*****7970	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
61	Sri Hartati Ekwan Rubiyanti, S.Ag.	08*****5040	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
62	Farhan Hidayat, S.H.I.	08*****9235	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
63	Drs. Muntasir, M.H.P.	08*****9003	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Lainnya	Layanan penyerahan produk pengadilan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
64	Andik Wicaksono, S.H., M.H.	08*****5129	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
65	Sutji Eny Lestari, S.H.	08*****6938	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
66	Ainuz Zaman, S.H.I.	08*****7779	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
67	Irfan Ardiansyah, S.T.	08*****1584	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
68	Jani, S.H.	08*****4512	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
69	Halifi, S.H.	08*****3952	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
70	Ria Ekowahyudi, S.Kom.	08*****0127	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
71	Muhammad Ali Qoyyimuddin, S.H.I.	08*****5519	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
72	Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.	08*****2331	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
73	Imran Saleh, S.H.	08*****7951	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
74	Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.	08*****0785	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
75	Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.	08*****0122	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
76	Dimas Wahyu Adrianto, S.E.	08*****8898	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
77	Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.	08*****3534	Strata-3 (S3)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
78	Muhamad Choirudin, S.H.I.	08*****8808	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
79	Teguh Wiyanto	08*****7800	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Karyawan Honorer	Layanan penyelesaian perkara

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
80	Rezza Haryo Nugroho, S.H.	08*****5861	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
81	Drs. Samsul Amri, S.H., M.H.	08*****7310	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
82	Drs. H. Moh. Munib, M.H.I.	08*****0351	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
83	Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.	08*****4077	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
84	Achmad Walif Rizqy, S.H.	08*****1345	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
85	Trimo, S.H., M.H.	08*****7938	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
86	Zaenul Yusufi, S.H.I.	08*****7408	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
87	Fia Afina Yusviana, S.Kom.	08*****7560	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
88	Harisman, S.H.I.	08*****7908	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
89	Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H.	08*****3605	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
90	Mundorin, S.H., M.H.	08*****3963	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
91	Nasaritha Randhitia Permata, S.H.	08*****8501	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
92	Irwan Abd. Rahman, S.H., M.H.	08*****8743	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
93	Tedy Agastya Dwi Permana, S.Kom.	08*****3213	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
94	Dwi Putra Damayanto, S.H.	08*****6644	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
95	Rusdi Isnani Yulkhamisyah, S.H.I., M.H.	08*****6715	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
96	Drs Muhammad Dihyah Wahid, MH	08*****2810	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
97	Annang Makruf	08*****3491	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
98	Ery Handini, S.H., M.H.	08*****4682	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
99	Rachmad Firman Kristanto	08*****1937	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
100	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom.	08*****7946	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
101	Ridho Firmansyah, S.H., M.H.	08*****0028	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
102	Diah Wijayanti, S.H.	08*****9681	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
103	Nurlailia Isnawati, S.Akun.	08*****6016	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
104	Eka Muharyanti, A.Md.	08*****0413	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
105	Hillyah Sa'diah, S.H., M.H.	08*****7789	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
106	Merinta Prameswari, S.A.	08*****2331	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
107	Anita Nurhikma, S.H., M.Hum.	08*****7979	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
108	Amron Nasrul Huda, S.H., M.Hum.	08*****3379	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
109	Mochamad Ischaq, S.H.	08*****5511	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
110	Kholid Hendra Irawan, S.H.	08*****9888	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
111	Widi Tri Hananto, S.Kom.	08*****1111	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
112	Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H.	08*****1308	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
113	Sigit Apriluberta, S.H.	08*****8378	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
114	Lia Safitri, S.IAN.	08*****7189	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
115	Moch. Afif Afandi, S.Kom.	08*****3917	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
116	Heru Santoso, S.H.I.	08*****5252	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Peneliti	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
117	Drs. Surib Wahyudi, S.H., M.H.	08*****7898	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
118	Aryl Zabarrespati, S.E.	08*****2989	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
119	Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag.	08*****5578	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
120	Agus Widyanto, S.H.I.	08*****0404	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
121	Maftuhin, S.H.	08*****3989	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
122	Utik Inayatin, S.Ag., M.H.	08*****5558	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
123	Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.	08*****0900	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
124	Suswati, S.H.	08*****4535	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
125	Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag.	08*****5578	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
126	Lilik Insiyati, S.Ag.	08*****7582	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
127	Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.	08*****8080	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
128	Amir Hamzah, S.H.	08*****4909	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
129	Abdul Rachman, S.H.	08*****5375	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
130	H. Zulkifli, S.Ag., S.H., M.H.	08*****6473	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
131	Fatmawati, S.H., M.H.	08*****4770	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
132	Moh. Muhyidin, S.H.	08*****6971	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
133	Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H.	08*****0998	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
134	H. Aris Dwi Sutyono, S.T.	08*****6268	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
135	M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.	08*****8001	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
136	Laili Hidayati, A.Md., S.H.	08*****9104	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
137	Syamsudl Dluha, S.Kom., M.H.I.	08*****7001	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
138	Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.	08*****0056	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
139	Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.	08*****9894	Strata-3 (S3)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
140	Novan Yahya Utama, S. kom	08*****7946	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
141	Yeti Rianawati, S.H., M.H.	08*****0543	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
142	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.	08*****7017	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
143	Drs. H. Karmin, M.H.	08*****2021	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
144	Norma Atiq, S.H.	08*****9614	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
145	Dra. St. Khomariyah	08*****3661	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
146	Moh. Daroini, S.H., M.H.	08*****4212	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
147	H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.	0*****0493	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
148	Drs. Zainal Arifin, M.H.	08*****1560	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
149	Irwan Abd. Rahman, S.H., M.H.	08*****8743	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
150	Moch. Ali, S.H., M.H	08*****7910	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
151	Dyah Puspita Suningrum, S.H., M.H.	08*****9198	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
152	Ricky Rizki Rahmawan, S.H.	08*****8807	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
153	Drs. Masyhudi, M.H.E.S	08*****4646	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
154	Ivana Rantansari, S.A.P.	08*****9196	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
155	Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H.	08*****7778	Strata-3 (S3)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
156	Atiqotul Maula Alfariyah, S.Ag., M.H.	08*****9250	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
157	Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H.	08*****7574	Strata-3 (S3)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
158	Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H	08*****8071	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
159	Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H. M.HES.	08*****3282	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
160	Achmad Chozin, S.H.	08*****6910	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
161	H. Mashudi, S.Ag., M.H.	08*****3127	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
162	H. Teguh Santoso, S.H.	08*****1718	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
163	Dra. Hj. Dyah Kholidah Nuraini	08*****0096	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
164	Siti Sopiya, S.Si.	08*****3646	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
165	Moh. Imron, S.H., M.H.	08*****9009	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
166	Setianto, S.H, M.H.	08*****0549	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
167	Drs. H. Imam Farok, M.HES.	08*****3661	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
168	Setianto, S.H, M.H.	08*****0549	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyerahan produk pengadilan
169	Setianto, S.H, M.H.	08*****0549	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
170	M. Sa'dan, S.Ag.	082352794589	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
171	Fathul Mubin, S.H.I.	08*****2599	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
172	Aisyah, S.Kom., M.H.	08*****6119	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan infomasi dan layanan pengaduan
173	Emma Fatmala, S.Kom., M.H.	08*****2837	Strata-2 (S2)	Perempuan	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
174	Syaiful Anwar, S.Ag., M.H.P.	08*****9922	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
175	Mohamad Arif Fauzi, S.H.I., M.H.	08*****8997	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara

No.	Nama Responden	No. HP	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jenis Layanan yang Diterima
176	Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.	08*****7886	Strata-2 (S2)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
177	M. Nidzam Fickry, S.H.	08*****0248	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan penyelesaian perkara
178	Sugiarto, S.H.	08*****8488	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan
179	Tahir, S.H.	08*****4535	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan pembinaan dan pengawasan
180	Djuliadi	08*****0969	Diploma IV/ Strata-1 (S1)	Laki-laki	Pegawai Negeri Sipil	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan

1. Jenis Layanan

Pada periode triwulan II ini, sebagian besar responden adalah responden yang menggunakan layanan pembinaan dan pengawasan dan layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan dengan masing-masing sejumlah 61 orang (33,89%). Disusul dengan layanan penyelesaian perkara sejumlah 42 orang (23,33%), dan layanan penyerahan produk pengadilan sejumlah 16 orang (8,89%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persentase
1	Layanan pembinaan dan pengawasan	61 orang	33,89%
2	Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan	61 orang	33,89%
3	Layanan penyelesaian perkara	42 orang	23,33%
4	Layanan penyerahan produk pengadilan	16 orang	8,89%
Jumlah		180 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 7 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan

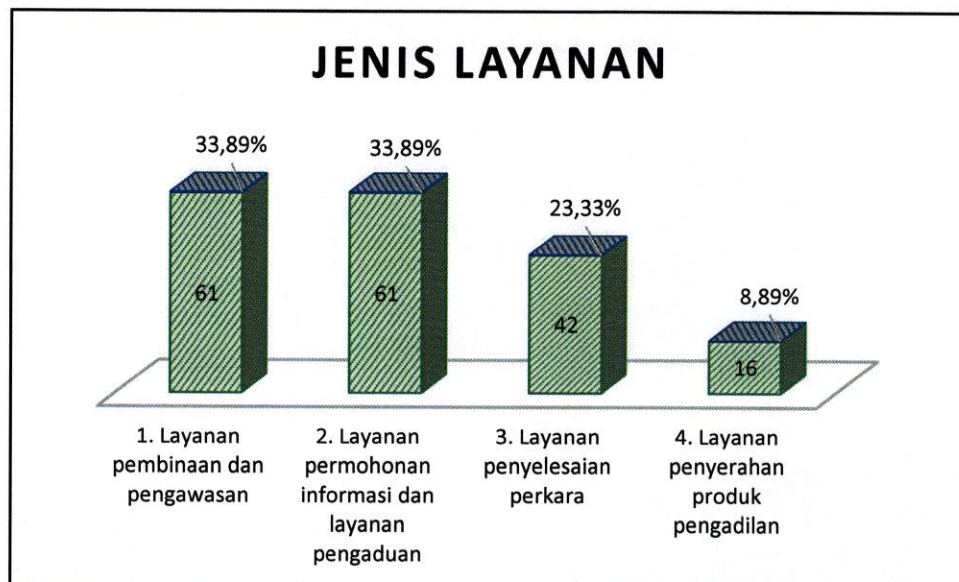
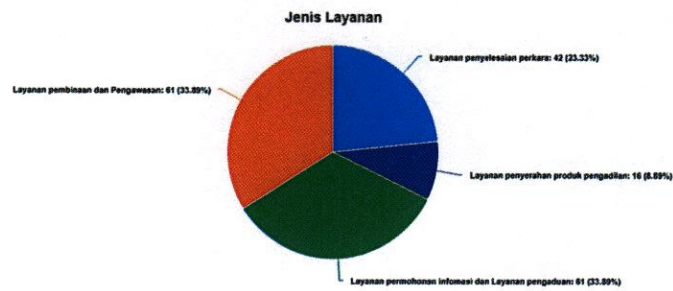


Diagram 1 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Pengguna Jenis Layanan



Jenis Layanan	
Jenis Layanan	Jumlah Responden
Layanan penyelesaian perkara	42
Layanan penyerahan produk pengadilan	16
Layanan permohonan informasi dan Layanan pengadilan	61
Layanan pembinaan dan Pengawasan	61

2. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sejumlah 118 orang (65,56%) dan sisanya perempuan sejumlah 62 orang (34,44%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	118 orang	65,56%
2	Perempuan	62 orang	34,44%
Jumlah		180 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 8 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin

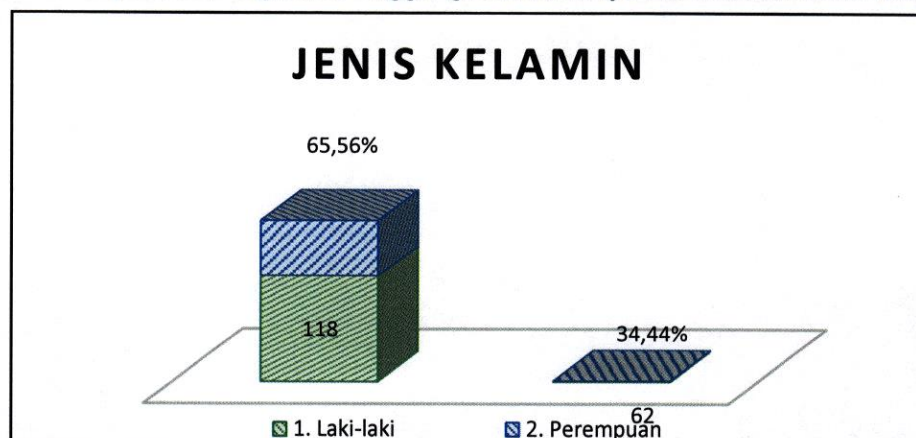
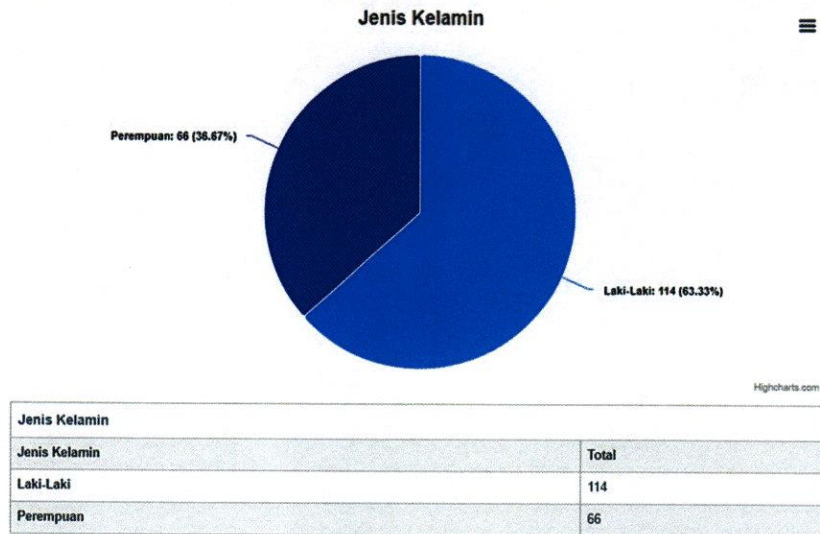


Diagram 2 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin



3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden berpendidikan Strata-1 (S1), yaitu sejumlah 93 orang (51,67%). Disusul dengan responden Strata-2 (S2) sejumlah 80 orang (44,44%), Diploma (D1/D2/D3) sejumlah 4 orang (2,22%), dan SLTA/ SMA/ Sederajat sejumlah 3 orang (1,67%), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Strata-3 (S3)	4 orang	2,22%
2	Strata-2 (S2)	73 orang	40,56%
3	Strata-1 (S1)	98 orang	54,44%
4	Diploma (D1/D2/D3)	3 orang	1,67%
5	SLTA/ SMA/ Sederajat	2 orang	1,11%
Jumlah		180 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 9 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan

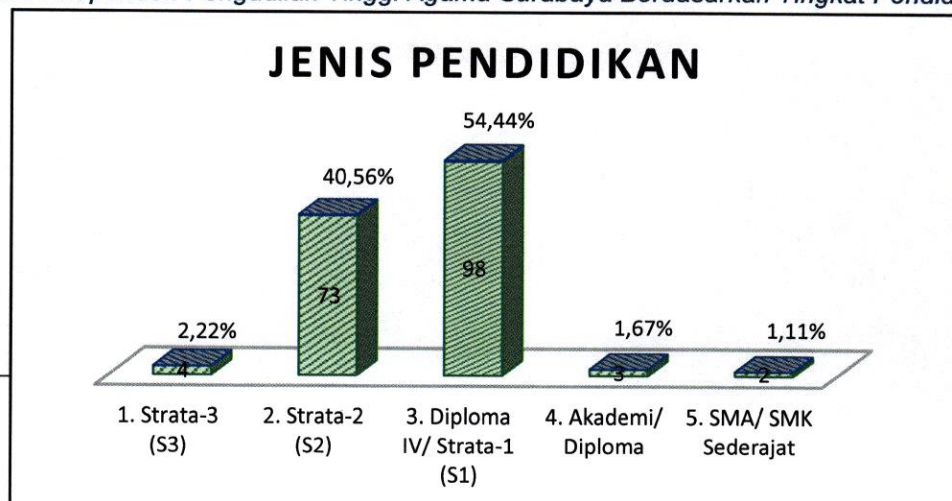
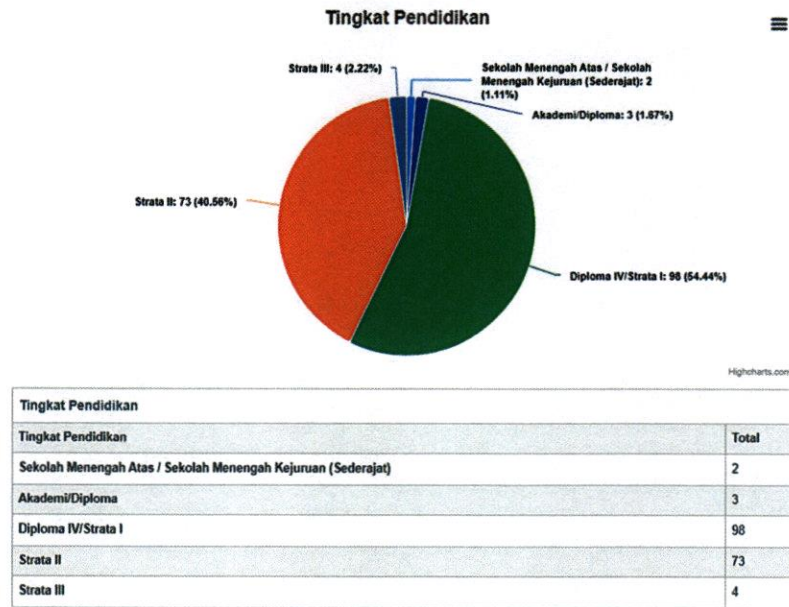


Diagram 3 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan



4. Pekerjaan

Berdasarkan tabel responden, sebagian besar responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu sejumlah 169 orang (93,89%), karyawan swasta sejumlah 6 orang (3,33%), karyawan honorer sejumlah 4 orang (2,22%), dan sisanya berprofesi sebagai pelajar sejumlah 1 orang (0,56%) sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	169 orang	96,02%
2	Karyawan honorer	4 orang	2,27%
3	Karyawan swasta	2 orang	1,14%
4	Pelajar/ mahasiswa	1 orang	0,56%
5	Pengacara	1 orang	0,57%
6	Konstruksi	0 orang	0,00%
7	Peneliti	1 orang	0,57%
8	Belum/ tidak bekerja	1 orang	0,57%
9	Lainnya	1 orang	0,57%
Jumlah		180 orang	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 10 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

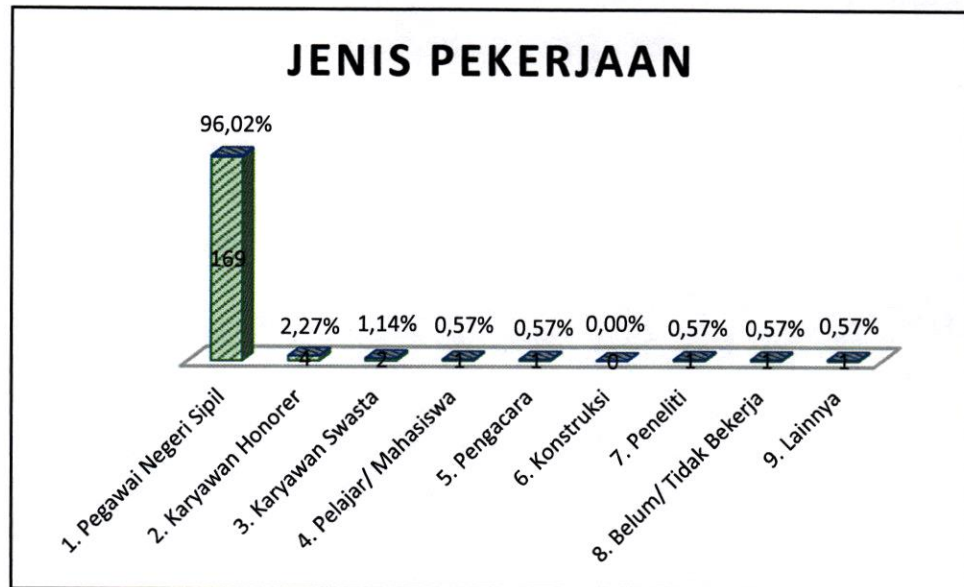
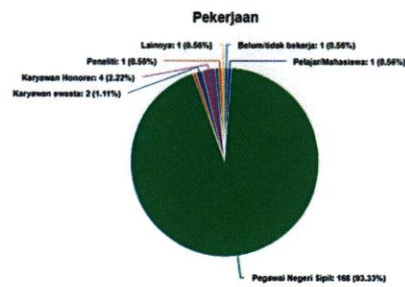


Diagram 4 Responden Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

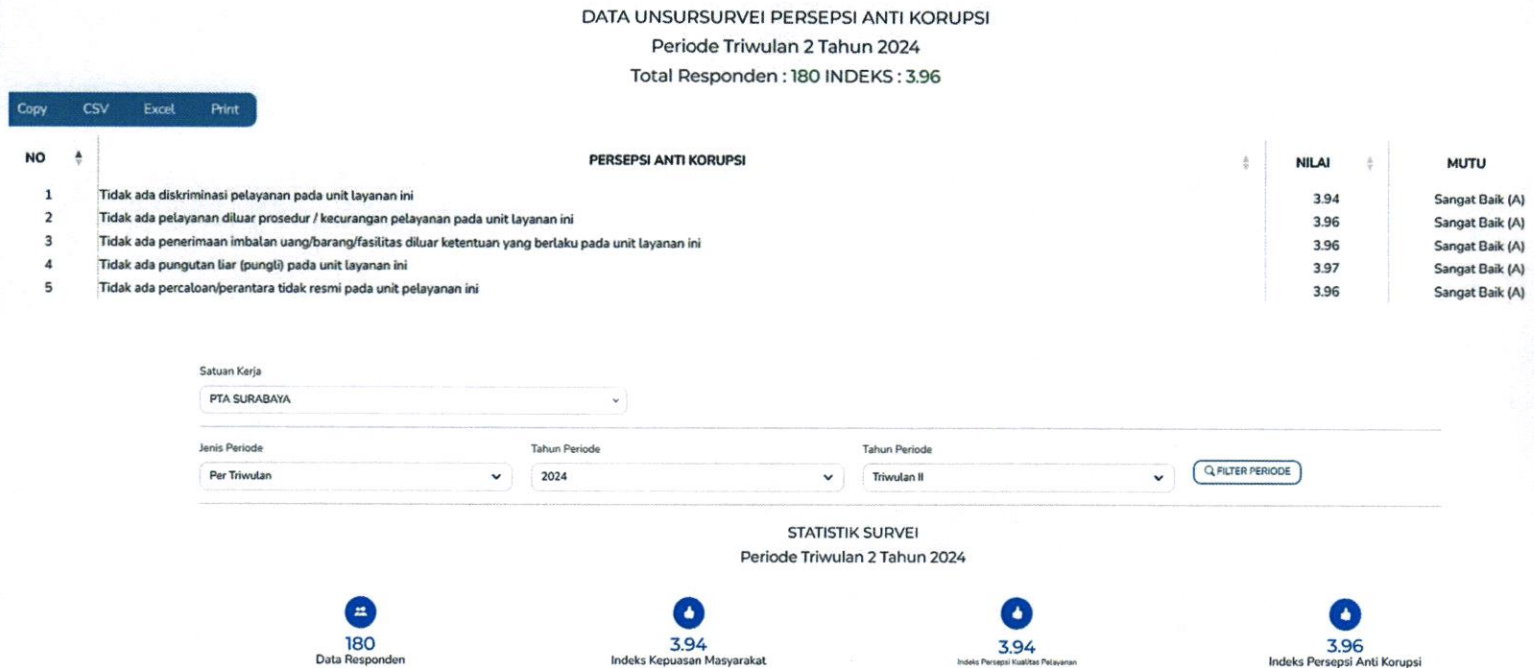


Pekerjaan	
Pekerjaan	Total
Belum/tidak bekerja	1
Pelajar/Mahasiswa	1
Pegawai Negeri Sipil	168
Konstruksi	1
Karyawan swasta	2
Karyawan Honoror	4
Pengacara	1
Peneliti	1
Lainnya	1

B. Data dukung Lainnya

Berikut ini dilampirkan data dukung lainnya berupa tangkapan layar pada aplikasi Sistem Informasi Survei Terintegrasi (Si Surti) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Gambar 2 Data Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)



Data Detail Hasil Pengisian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
1	6	6	6	6	6	4
2	6	6	6	6	6	4
3	6	6	6	6	6	4
4	6	6	6	6	6	4
5	6	6	6	6	6	4
6	6	6	6	6	6	4
7	6	6	6	6	6	4
8	6	6	6	6	6	4
9	6	6	6	6	6	4
10	6	6	6	6	6	4
11	5	5	5	6	6	3,4
12	6	6	6	6	6	4
13	6	6	6	6	6	4
14	6	6	6	6	6	4
15	6	6	6	6	6	4
16	5	5	5	5	5	3
17	6	6	6	6	6	4
18	6	6	6	6	6	4
19	6	6	6	6	6	4
20	6	6	6	6	6	4
21	6	6	6	6	6	4
22	6	6	6	6	6	4
23	6	6	6	6	6	4
24	6	6	6	6	6	4
25	6	6	6	6	6	4
26	6	6	6	6	6	4
27	6	6	6	6	6	4
28	6	6	6	6	6	4
29	6	6	6	6	6	4
30	6	6	6	6	6	4
31	6	6	6	6	6	4
32	6	6	6	6	6	4
33	6	6	6	6	6	4
34	6	6	6	6	6	4
35	6	6	6	6	6	4
36	6	6	6	6	6	4
37	5	5	5	5	5	3
38	6	6	6	6	6	4
39	6	6	6	6	6	4
40	6	6	6	6	6	4
41	6	6	6	6	6	4
42	6	6	6	6	6	4
43	6	6	6	6	6	4
44	6	6	6	6	6	4
45	6	6	6	6	6	4
46	6	6	6	6	6	4
47	6	6	6	6	6	4
48	6	6	6	6	6	4

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
49	6	6	6	6	6	4
50	6	6	6	6	6	4
51	6	6	6	6	6	4
52	6	6	6	6	6	4
53	6	6	6	6	6	4
54	6	6	6	6	6	4
55	6	6	6	6	6	4
56	6	6	6	6	6	4
57	6	6	6	6	6	4
58	6	6	6	6	6	4
59	6	6	6	6	6	4
60	5	6	6	6	6	3,8
61	6	6	6	6	6	4
62	6	6	6	6	6	4
63	6	6	6	6	6	4
64	5	5	5	5	5	3
65	6	6	6	6	6	4
66	6	6	6	6	6	4
67	6	6	6	6	6	4
68	6	6	6	6	6	4
69	6	6	6	6	6	4
70	6	6	6	6	6	4
71	6	6	6	6	6	4
72	6	6	6	6	6	4
73	6	6	6	6	6	4
74	6	6	6	6	6	4
75	6	6	6	6	6	4
76	6	6	6	6	6	4
77	6	6	6	6	6	4
78	6	6	6	6	6	4
79	6	6	6	6	6	4
80	5	5	5	5	5	3
81	6	6	6	6	6	4
82	6	6	6	6	6	4
83	6	6	6	6	6	4
84	6	6	6	6	6	4
85	6	6	6	6	6	4
86	6	6	6	6	6	4
87	6	6	6	6	6	4
88	6	6	6	6	6	4
89	6	6	6	6	6	4
90	6	6	6	6	6	4
91	6	6	6	6	6	4
92	6	6	6	6	6	4
93	6	6	6	6	6	4
94	6	6	6	6	6	4
95	6	6	6	6	6	4
96	6	6	6	6	6	4
97	6	6	6	6	6	4
98	6	6	6	6	6	4
99	6	6	6	6	6	4

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
100	6	6	6	6	6	4
101	5	5	5	6	5	3,2
102	6	6	6	6	6	4
103	6	6	6	6	6	4
104	6	6	6	6	6	4
105	6	6	6	6	6	4
106	6	6	6	6	6	4
107	6	6	6	6	6	4
108	6	6	6	6	6	4
109	6	6	6	6	6	4
110	5	5	5	5	5	3
111	6	6	6	6	6	4
112	5	5	5	5	5	3
113	6	6	6	6	6	4
114	6	6	6	6	6	4
115	6	6	6	6	6	4
116	6	6	6	6	6	4
117	6	6	6	6	6	4
118	6	6	6	6	6	4
119	6	6	6	6	6	4
120	6	6	6	6	6	4
121	6	6	6	6	6	4
122	6	6	6	6	6	4
123	6	6	6	6	6	4
124	6	6	6	6	6	4
125	6	6	6	6	6	4
126	6	6	6	6	6	4
127	6	6	6	6	6	4
128	6	6	6	6	6	4
129	6	6	6	6	6	4
130	6	6	6	6	6	4
131	6	6	6	6	6	4
132	6	6	6	6	6	4
133	6	6	6	6	6	4
134	6	6	6	6	6	4
135	6	6	6	6	6	4
136	6	6	6	6	6	4
137	6	6	6	6	6	4
138	6	6	6	6	6	4
139	6	6	6	6	6	4
140	6	6	6	6	6	4
141	6	6	6	6	6	4
142	6	6	6	6	6	4
143	6	6	6	6	6	4
144	6	6	6	6	6	4
145	6	6	6	6	6	4
146	6	6	6	6	6	4
147	6	6	6	6	6	4
148	6	6	6	6	6	4
149	5	6	6	6	6	3,8
150	6	6	6	6	6	4

No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	Indeks
151	6	6	6	6	6	4
152	6	6	6	6	6	4
153	6	6	6	6	6	4
154	6	6	6	6	6	4
155	6	6	6	6	6	4
156	6	6	6	6	6	4
157	6	6	6	6	6	4
158	6	6	6	6	6	4
159	6	6	6	6	6	4
160	6	6	6	6	6	4
161	6	6	6	6	6	4
162	6	6	6	6	6	4
163	6	6	6	6	6	4
164	6	6	6	6	6	4
165	6	6	6	6	6	4
166	6	6	6	6	6	4
167	6	6	6	6	6	4
168	6	6	6	6	6	4
169	6	6	6	6	6	4
170	6	6	6	6	6	4
171	6	6	6	6	6	4
172	6	6	6	6	6	4
173	6	6	6	6	6	4
174	6	6	6	6	6	4
175	6	6	6	6	6	4
176	6	6	6	6	6	4
177	6	6	6	6	6	4
178	6	6	6	6	6	4
179	6	6	6	6	6	4
180	6	6	6	6	6	4
Total	1070	1072	1072	1074	1073	-
Jumlah Kuesioner	180	180	180	180	180	-
Rata - rata	3,94	3,96	3,96	3,97	3,96	-
Rata-rata x Bobot	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	-
Nilai Rata-rata Tertimbang IPAK Unit Pelayanan						3,96 98,95

Kesimpulan:

Nilai IPAK setelah dikonversi : 98,95

Mutu Pelayanan : A

Kinerja Unit Pelayanan : Bersih Dari Korupsi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dengan 180 responden yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki indeks persepsi anti korupsi, yaitu 3,96 atau 98,95 dan masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut terdiri dari 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks, sebagai berikut:

1. Indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,94;
2. Indikator tidak ada pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,96;
3. Indikator tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,96;
4. Indikator tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,97;
5. Indikator tidak ada percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan ini mendapatkan indeks 3,96.

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi kualitas pelayanan pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Triwulan II Tahun 2024 (periode survei bulan April – Juni) di atas menunjukkan bahwa mayoritas memiliki indeks di atas 3,95 atau masuk pada mutu “**BERSIH DARI KORUPSI**”. Namun, dari 5 (lima) unsur/ indikator tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikator dengan indeks terendah, yaitu indikator tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini. Terhadap indikator dengan nilai tertinggi agar tetap dipertahankan hasil yang baik ini serta tetap selalu melakukan penguatan integritas seluruh unsur aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya demi terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sementara terhadap indikator dengan nilai terendah agar tetap dipantau dan lebih ditingkatkan lagi.

LAMPIRAN

1. SK Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
2. Surat Permohonan Data Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
3. Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: 2704/KPTA.W13-A/PS1.7/VI/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI
KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta dalam rangka peningkatan pelayanan mutu dan kelancaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menunjuk kembali Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2024;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang transparan dan akuntabel, serta untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK);
 - d. Bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraam Megara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 1720/KPTA.W13-A/PS.1.7/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- KEDUA : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- KEEMPAT : Menetapkan tugas-tugas Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 17 Juni 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. ✓

Tembusan:

1. Yth. Plh. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Yth. Plh. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.; dan
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Lampiran I : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor : 2704/KPTA.W13-A/PS1.7/VI/2024
Tanggal : 17 Juni 2024

**PENUNJUKAN TIMSURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI
KUALITAS PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

NO.	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	
		DINAS	TIM
1	Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung
2	Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	Rusli, S.H., M.H.	Panitera	Pengarah
4	Dr. Naffi, S.Ag., M.H.	Sekretaris	
5	H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian	Ketua Tim
6	Benny Hardiyanto, S.H.	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran	Sekretaris
7	Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.	Perencana Pertama	Penyusun Laporan
8	Nur Sa'adah Muhammad, S.H.I.	Perencana Muda	
9	Ihdina Sabilal Haq, S.E.I.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Surveyor
10	Eka Siti Khomariyah, S.E.	Perencana Pertama	
11	Kartika Citraning Karwendyanto, S.Pd	Petugas PTSP	
12	Novera Intan Hapsari Suwarno Putri, S.Sos.	Petugas PTSP	

Lampiran II : Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor : 2704/KPTA.W13-A/PS1.7/VI/2024
Tanggal : 17 Juni 2024

JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM), SURVEI PERSEPSI KUALITAS
PELAYANAN (SPKP), DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

NO.	JABATAN/ KEDUDUKAN	JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
1.	Pelindung	Memberikan arahan dalam rangka kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
3.	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan jadwal survei; b. Menyiapkan materi <i>briefing</i> terhadap persiapan hingga pelaporan hasil survei.
4.	Ketua Tim	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan survei; b. Memimpin tahapan pelaksanaan survei mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan penyajian/ pelaporan hasil survei; c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan survei; d. Menentukan responden; e. Melaporkan hasil kegiatan survei kepada Penanggung Jawab.
5.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua Tim b. Menyiapkan dan mengirimkan surat terkait pelaksanaan survei; c. Menatausahakan persuratan yang terkait dengan pelaksanaan survei.

NO.	JABATAN/ KEDUDUKAN	JOB DESCRIPTION/ URAIAN TUGAS
6.	Penyusun Laporan	Menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; Melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei.
7.	<i>Surveyor</i>	Menganalisis dan mengolah hasil survei.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 7, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis
Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. www.pta-surabaya.go.id, ptasurabaya@gmail.com

Nomor : 2566/WKPTA.W13-A/OT1.6/VII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permintaan Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II Tahun 2024

Surabaya, 03 Juni 2024

Yth. Ketua Pengadilan Agama
se Jawa Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 2496/SEK/OT1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Evaluasi PMPZI Tahun 2024, dalam rangka mengukur hasil pembangunan Zona Integritas melalui pelaksanaan Pekan Survei atas Pembangunan Zona Integritas, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diminta kepada Saudara untuk menentukan 5 (lima) orang aparatur peradilan dari satuan kerja saudara untuk menjadi responden pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam kurun waktu pelayanan triwulan II (periode April s.d. Juni) tahun 2024;
2. Seluruh responden sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, diminta untuk mengisi formulir survei melalui aplikasi *e-survei* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tautan [link https://survei.badilag.net/](https://survei.badilag.net/); dan
3. Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud agar diisi secara lengkap paling lambat pada hari Jumat, tanggal **17 Juni 2024**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Rokhanah

Publikasi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TRIWULAN II TAHUN 2024

NILAI IPAK

3,96

NILAI INTERVAL KONVERSI

98,95

RESPONDEN

Jumlah : 180 orang
Jenis Kelamin : L: 118 / P: 62

Pendidikan
Strata-3 : 4 orang
Strata-2 : 73 orang
Diploma IV/Strata-1 : 98 orang
Diploma (D1/D2/D3) : 3 orang
SLTA/SMA/Sederajat : 2 orang

Periode Survei April s.d. Juni 2024

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN UPAYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TRIWULAN II TAHUN 2024

NILAI INDEKS PADA INDIKATOR

NO	RUANG LINGKUP/INDIKATOR	NILAI	MUTU PELAYANAN
1.	<u>Diskriminasi Pelayanan</u>	3,94	<u>Bersih dari Korupsi</u>
2.	<u>Pelayanan di Luar Prosedur</u>	3,96	<u>Bersih dari Korupsi</u>
3.	<u>Permintaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas di Luar Ketentuan yang Berlaku</u>	3,96	<u>Bersih dari Korupsi</u>
4.	<u>Pungutan Liar</u>	3,97	<u>Bersih dari Korupsi</u>
5.	<u>Percaloan/ Perantara</u>	3,96	<u>Bersih dari Korupsi</u>

SURVEY DILAKUKAN UNTUK MENJARING MASUKAN DARI RESPONDEN BERKAITAN DENGAN UPAYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMINIMALISIR CELAH KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA